**PENERAPAN KAIDAH AL-UMURU BI MAQASIDIHA DALAM PENENTUAN
HAK KEPEMILIKAN DI MUAMALAH KONTEMPORER PERSPEKTIF
IMAM GHAZALI DAN YUSUF AL-QARADAWI**

Maysheila Gustin^{1*}, Muhammad Yazid²

^{1,2} Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Indonesia

sheilamgysht@gmail.com^{1*}, muhammadyazid02@gmail.com²

Abstrak

Studi ini meneliti penerapan prinsip al-umuru bi maqasidiha dalam penetapan hak kepemilikan dalam praktik muamalah modern, khususnya dari perspektif Imam Al-Ghazali dan Yusuf Al-Qaradawi. Prinsip ini menegaskan bahwa hukum dari suatu tindakan ditentukan oleh niat yang mendasari tindakan itu. Dalam kondisi ekonomi saat ini, berbagai bentuk kepemilikan seperti aset digital, saham, dan hak kekayaan intelektual harus dianalisis tidak hanya dari sudut pandang legal formal, tetapi juga dari tujuan dan dampak sosial yang muncul. Melalui metode deskriptif-analitis dan pendekatan kualitatif, penelitian ini meneliti literatur klasik dan modern untuk memahami keterkaitan prinsip tersebut. Al-Ghazali menekankan pentingnya niat yang positif dan bermanfaat bagi masyarakat dalam pengelolaan harta, sedangkan Al-Qaradawi mengadaptasi konsep serupa untuk menilai transaksi modern dari aspek etika dan syariah. Studi ini menyatakan bahwa prinsip al-umuru bi maqasidiha sangat krusial dalam mengevaluasi legitimasi kepemilikan dari perspektif spiritual, moral, dan sosial, serta berfungsi sebagai dasar untuk membangun sistem ekonomi Islam yang adil dan bermanfaat di tengah perubahan zaman.

Kata Kunci: *Al-Umuru Bi Maqasidiha, Kepemilikan, Maqasid Syariah, Muamalah Kontemporer, Al-Ghazali, Yusuf Al-Qaradawi*

1. PENDAHULUAN

Hukum Islam merupakan sistem hukum yang komprehensif dan terintegrasi, mencakup pengaturan hubungan antara manusia dan Tuhan serta interaksi antar individu, termasuk dalam aspek sosial dan ekonomi. Salah satu komponen utama dalam hukum Islam adalah muamalah, yang mengacu pada berbagai jenis interaksi sosial dan ekonomi yang diciptakan oleh manusia. Dalam area ini, terdapat sekumpulan prinsip hukum yang menjadi

dasar etika dan legalitas perilaku manusia. Salah satu prinsip yang sangat mendasar adalah kaidah al-umuru bi maqasidiha, yang menegaskan bahwa setiap perbuatan dievaluasi berdasarkan niat dan tujuannya. Prinsip ini tidak hanya merupakan dasar utama dalam ushul fiqh, tetapi juga berperan sebagai instrumen penilaian untuk menilai keabsahan dan nilai etika suatu tindakan, termasuk yang berkaitan dengan kepemilikan.

Dalam era masyarakat modern, terutama di tengah pertumbuhan globalisasi dan digitalisasi ekonomi, bentuk serta cara kepemilikan mengalami transformasi yang besar. Kepemilikan saat ini tidak hanya terbatas pada barang material seperti tanah, rumah, atau kendaraan, tetapi juga mencakup entitas non-material seperti saham, hak cipta, aset digital, dan kekayaan intelektual. Transformasi ini menghadirkan tantangan baru dalam hukum Islam, khususnya dalam memastikan bahwa semua jenis kepemilikan tersebut tidak hanya valid secara formal, tetapi juga sejalan dengan prinsip-prinsip maqasid syariah, yang mencakup perlindungan terhadap lima aspek utama: agama (hifz al-din), jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-'aql), keturunan (hifz al-nasl), dan harta (hifz al-mal).

Prinsip al-umuru bi maqasidiha sangat penting dalam konteks ini, karena prinsip ini menyoroti bahwa hukum Islam seharusnya berorientasi pada inti dan tujuan dari sebuah tindakan, bukan hanya pada penampilannya. Dari perspektif ini, akuisisi dan pemanfaatan aset, meskipun secara resmi dianggap legal, tetap harus dievaluasi berdasarkan tujuan dan konsekuensi sosialnya. Contohnya, membeli lahan dalam jumlah besar dan membiarkannya untuk dijual kembali dengan harga lebih tinggi bisa dinilai buruk jika tujuannya hanya untuk spekulasi yang merugikan masyarakat. Demikian pula, kepemilikan hak cipta atau paten yang digunakan untuk menguasai pasar dan menekan konsumen, meskipun tidak melanggar hukum, dapat dianggap tidak sah dari sudut pandang maqasid syariah jika merugikan kepentingan publik.

Relevansi diskusi ini tidak terlepas dari kenyataan bahwa banyak aktivitas ekonomi saat ini justru mengaburkan batasan halal dan haram, antara kepemilikan yang adil dan yang merugikan, serta antara transaksi yang sah dan yang manipulatif. Dengan demikian, prinsip al-umuru bi maqasidiha dapat berperan sebagai tolok ukur krusial dalam mengevaluasi moralitas dan legitimasi berbagai bentuk kepemilikan serta transaksi ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat Muslim di era modern saat ini. Ketentuan ini tidak hanya berfungsi sebagai prinsip teoretis, tetapi juga sebagai sarana praktis dalam menentukan dan mengarahkan tindakan ekonomi agar selalu sesuai dengan nilai-nilai keadilan, tanggung jawab sosial, dan kesejahteraan bersama.

Dalam konteks ini, penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki secara mendalam penerapan prinsip *al-umuru bi maqasidiha* dalam menetapkan hak kepemilikan dalam kegiatan ekonomi kontemporer. Studi ini tidak hanya membahas konsep dan prinsip dasar, tetapi juga menyelidiki pemikiran dari dua tokoh besar dalam Islam, yaitu Imam Al-Ghazali dan Yusuf Al-Qaradawi, yang berperan penting dalam pengembangan wacana maqasid syariah serta implementasinya dalam konteks sosial dan ekonomi umat Muslim. Keduanya mencerminkan dua metode yang berbeda berdasarkan zaman dan konteks, tetapi memiliki pemikiran dasar yang serupa dalam menekankan pentingnya niat, tujuan, dan kemaslahatan sebagai ukuran utama terhadap validitas tindakan hukum dan ekonomi.

Imam Al-Ghazali, sebagai tokoh ulama tradisional, mengembangkan teori maqasid syariah yang berperan sebagai kerangka acuan normatif untuk menggali dan merumuskan hukum Islam secara lebih mendalam. Dari perspektifnya, kekayaan bukan tujuan utama, tetapi sarana untuk meraih kebaikan yang lebih besar, baik untuk diri sendiri maupun bersama. Karena itu, semua bentuk kepemilikan dan penggunaan harta harus diukur menurut sumbangannya terhadap lima tujuan utama syariah. Peta yang tidak memberikan keuntungan bagi masyarakat, bahkan malah merugikan, menurut Al-Ghazali, dapat dianggap menyimpang dari maksud syariah, meskipun secara resmi sah menurut undang-undang yang berlaku.

Sebaliknya, Yusuf Al-Qaradawi sebagai intelektual kontemporer menekankan perlunya penerapan maqasid dalam menghadapi perubahan ekonomi saat ini. Ia menekankan berbagai jenis baru kepemilikan seperti aset digital, saham, dan hak kekayaan intelektual, yang belum diuraikan dengan jelas dalam literatur fiqh tradisional. Dalam perspektifnya, prinsip *al-umuru bi maqasidiha* harus diimplementasikan secara adaptif dan kontekstual sesuai dengan kemajuan zaman, tanpa mengabaikan nilai-nilai fundamental syariah. Ia menegaskan bahwa keabsahan suatu transaksi atau kepemilikan tidak hanya bergantung pada aturan formal, tetapi juga perlu memperhatikan motivasi, niat, tujuan dari tindakan tersebut, dan dampaknya bagi masyarakat umum.

Dengan memanfaatkan kaidah ini sebagai instrumen analisis, penelitian ini ingin menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki tingkat adaptabilitas yang tinggi terhadap perubahan sosial dan ekonomi tanpa mengorbankan nilai-nilai dan etika dasarnya. Penerapan prinsip *al-umuru bi maqasidiha* dalam konteks kepemilikan saat ini menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang tidak hanya memperhatikan aspek legal, tetapi juga memperhatikan spiritualitas, moralitas, dan kemaslahatan. Oleh karena itu, sangat krusial bagi setiap Muslim

untuk memahami bahwa hak kepemilikan bukan hanya mengenai status hukum atas suatu objek atau aset, tetapi juga berkaitan dengan tanggung jawab etis dalam cara mendapatkannya dan menggunakannya

Selanjutnya, penelitian ini juga berfungsi untuk memberikan sumbangan pada pengembangan literatur fiqh muamalah, terutama dalam memperkuat landasan nilai dalam konsep kepemilikan. Melalui analisis pemikiran Imam Al-Ghazali dan Yusuf Al-Qaradawi, penulis ingin menyajikan sintesis antara tradisi klasik dan pendekatan kontemporer dalam menghadapi tantangan zaman. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan konseptual dan praktis kepada pelaku bisnis, pembuat kebijakan, serta komunitas Muslim secara keseluruhan, dalam menilai, merancang, dan menerapkan bentuk kepemilikan yang tidak hanya legal tetapi juga etis, adil, dan memberikan manfaat.

Dengan demikian, signifikansi penelitian ini dapat dilihat dari dua aspek utama. Pertama, agar perkembangan bentuk kepemilikan dan transaksi ekonomi saat ini tetap sejalan dengan prinsip-prinsip Islam. Kedua, untuk menegaskan bahwa evaluasi terhadap kepemilikan tidak bisa hanya dilihat dari perspektif hukum positif, melainkan juga harus mempertimbangkan aspek niat, tujuan, dan dampaknya bagi masyarakat. Melalui penerapan *al-umuru bi maqasidiha* sebagai pendekatan utama, penelitian ini berusaha mengatasi tantangan terkini sekaligus meningkatkan pemahaman komunitas Muslim mengenai hukum muamalah yang bersifat adaptif namun tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah

2. METODE PENELITIAN

Studi ini menerapkan metode kualitatif dengan pendekatan analitis-deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena isu yang diteliti terkait dengan aspek normatif dan konseptual, yaitu mengenai prinsip-prinsip hukum Islam serta interpretasi terhadap kaidah *al-umuru bi maqasidiha* dalam konteks muamalah modern. Tujuan dari penelitian ini bukanlah melakukan pengukuran statistik atau angka, melainkan untuk memahami lebih dalam nilai, arti, dan relevansi aturan tersebut dalam proses pembentukan, pelaksanaan, dan penilaian hak kepemilikan dalam Islam, dengan penekanan pada pemikiran dua tokoh kunci: Imam Al-Ghazali dan Yusuf Al-Qaradawi.

Metode analitis-deskriptif yang dipakai dalam penelitian ini bertujuan untuk secara sistematis menggambarkan pemahaman dan penerapan prinsip *al-umuru bi maqasidiha* dalam hukum Islam, terutama yang berkaitan dengan kepemilikan dalam konteks modern.

Deskripsi yang dihasilkan akan dianalisis secara mendalam untuk mengidentifikasi keterkaitan antara niat yang menjadi dasar hukum dan validitas kepemilikan, baik dari perspektif normatif maupun praktis. Metode ini sangat cocok untuk menganalisis doktrin hukum Islam yang berasal dari nash, kaidah ushul fiqh, dan pemikiran para ulama dari dahulu hingga kini.

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari studi pustaka, yaitu dengan menganalisis berbagai literatur primer dan sekunder yang terkait. Literatur utama mencakup karya-karya klasik dalam fiqh dan ushul fiqh, terutama yang mengupas kaidah hukum Islam serta konsep kepemilikan, seperti karya Imam Al-Ghazali. Sebaliknya, literatur sekunder meliputi riset dan karya ilmiah terkini yang membahas penerapan maqasid syariah serta interpretasi modern mengenai transaksi muamalah, termasuk pemikiran Yusuf Al-Qaradawi. Data yang terkumpul selanjutnya dianalisis dengan mengaitkan prinsip-prinsip hukum tersebut dengan keadaan ekonomi saat ini, termasuk hak cipta, paten, aset digital, serta bentuk-bentuk kepemilikan lainnya yang sedang berkembang.

Di samping itu, pendekatan tematik juga digunakan untuk menyelidiki perbedaan fokus antara pemikiran Al-Ghazali yang memiliki dimensi spiritual dan filosofis, serta cara Yusuf Al-Qaradawi yang lebih relevan dan kontekstual Tujuannya agar analisis tidak hanya fokus pada aspek teori, tetapi juga dapat memberikan sumbangan terhadap praktik ekonomi Islam yang etis dan mengedepankan kemaslahatan

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

1) Pengertian Kaidah Al-Umuru Bi Maqasidiha

Kaidah Al-Umuru Bi Maqasidiha adalah salah satu kaidah utama dalam kajian ushul fiqh. Kaidah tersebut Memiliki peran Penting dalam hukum Islam karena mengajarkan bahwasannya setiap tindakan seseorang harus berdasarkan niat-nya. Yang artinya, ucapan maupun tindakan seseorang tersebut akan dinilai berdasarkan maksud dan tujuan tindakan itu sendiri. Dengan demikian, setiap aktivitas manusia akan mendapatkan nilai hukumnya melalui instensi yang melekat pada hati pelakunya, hal ini berlaku pada semua aspek kehidupan salah satunya dalam Muamallah. Secara terminologis, kata "al-umur" mengacu pada konsep seperti keadaan, kebutuhan, kejadian, dan tindakan. Sedangkan istilah "al-maqashid" memiliki arti yang berhubungan dengan niat atau tujuan. Dalam konteks terminologi, kaidah ini dipahami sebagai tindakan dari seorang mukallaf, baik dalam bentuk

perkataan ataupun perilaku, yang akan diadili berdasarkan hukum syariat sesuai dengan niat yang mendasari tindakan tersebut. Menurut penjelasan, sebagian besar ulama ushul menyatakan bahwa kaidah adalah sebuah prinsip hukum umum yang dapat diterapkan pada berbagai ketentuan hukum yang lebih spesifik.

Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa niat dipahami sebagai keinginan untuk melaksanakan suatu tindakan yang disertai dengan pelaksanaannya. Sementara itu, berdasarkan pendapat mazhab Hanbali, niat terletak dalam hati karena niat mencerminkan maksud, dan maksud itu sendiri berada dalam hati. Al-Baihaqi menyatakan bahwa aktivitas manusia bisa berasal dari berbagai sumber, seperti hati, ucapan, atau bagian tubuh lainnya. Akan tetapi, niat yang datang dari hati dianggap sebagai yang paling penting karena dapat mengubah suatu tindakan menjadi ibadah. Niat berfungsi sangat krusial dalam menilai kualitas dan makna dari setiap amal yang membedakan antara ibadah dan adat, antara tindakan baik dan buruk, serta antara ibadah yang wajib dan sunnah. Dilakukan seseorang. Dengan demikian, niat perlu didasari oleh tujuan yang jelas untuk dapat membedakan antara ibadah dan adat, antara tindakan baik dan buruk, serta antara ibadah wajib dan sunnah. Dalam hal diterimanya suatu ibadah, memiliki tiga persyaratan penting yang perlu dipenuhi. Pertama, ibadah yang kita laksanakan harus dilakukan dengan niat yang tulus. Kedua, pada saat melaksanakan ibadah harus mengikuti aturan syariat yang sudah ditentukan oleh Allah dan dicontohkan oleh Rasulullah. Ketiga, niat yang telah ditentukan sejak mula ibadah harus tetap dijaga hingga ibadah tersebut selesai atau terwujud (istishhab niat).

2) Konsep Hak Kepemilikan

Konsep kepemilikan menurut Islam bersumber pada prinsip teologis yang mendasar, yaitu keyakinan bahwa segala kekayaan dan sumber daya alam sejatinya milik Allah SWT. Dalam Al-Qur'an, hal ini ditegaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 284: "Apa yang ada di langit dan di bumi adalah kepunyaan Allah. " Berdasarkan prinsip ini, manusia tidak dipandang sebagai pemilik sepenuhnya, melainkan sebagai wakil yang diberi tugas untuk mengelola kekayaan tersebut dengan penuh tanggung jawab. Oleh karena itu, sistem kepemilikan dalam Islam bersifat tidak mutlak seperti dalam kapitalisme, melainkan diatur oleh ketentuan yang mengharuskan tanggung jawab moral dan sosial. Dalam kajian fiqih muamalah, kepemilikan bukan tujuan utama, tapi sebuah alat untuk menggapai kebaikan baik bagi individu maupun masyarakat. Taqiyuddin An-Nabhani mengidentifikasi tiga jenis

kepemilikan dalam Islam: kepemilikan pribadi (al-milkiyah al-fardiyyah), kepemilikan publik (al-milkiyah al-‘ammah), dan kepemilikan oleh negara (al-milkiyah ad-daulah).

Kepemilikan pribadi memberikan wewenang kepada seseorang untuk memiliki dan menggunakan aset yang diperoleh secara sah, seperti rumah, kendaraan, atau hasil dari usaha, selama tidak melanggar aturan syariat. Kepemilikan publik meliputi sumber daya yang ditujukan untuk kebaikan bersama, seperti air, tanah publik, sumber daya alam, dan infrastruktur umum. Dalam hal ini, negara berfungsi sebagai pengelola, bukan pemilik mutlak, sehingga tindakan menyerahkan kepemilikan untuk keuntungan pribadi dilarang oleh prinsip ini. Kepemilikan oleh negara mencakup aset yang berada di bawah kewenangan pemerintah demi kepentingan masyarakat, seperti pajak, denda, dan barang yang disita. Harta tersebut harus dikelola dengan adil dan diarahkan untuk kesejahteraan masyarakat.

Di dalam fiqh muamalah, terdapat syarat agar kepemilikan dapat dianggap sah yaitu bahwa harta tersebut harus diperoleh dengan cara yang sesuai syariat. Beberapa cara yang diperbolehkan oleh Islam meliputi warisan (irith), perdagangan yang sah, pemberian (hibah), hadiah, atau harta rampasan perang (ghanimah) yang didistribusikan sesuai dengan prinsip Islam. Selain itu, Islam juga mengakui kepemilikan yang diperoleh melalui usaha pribadi, pengelolaan lahan terlantar (ihya' al-mawat), dan hasil dari sumber daya alam seperti laut. Penekanan pada legalitas dalam memperoleh harta ini menunjukkan bahwa Islam tidak hanya mengutamakan legalitas formal, tetapi juga mengharapkan integritas moral dalam setiap aktivitas ekonomi. Sebaliknya, segala bentuk kekayaan yang diperoleh dengan cara yang diharamkan, seperti riba, penipuan, perjudian, pencurian, korupsi, dan eksploitasi, berdasarkan hukum Islam dianggap tidak sah. Bahkan jika harta didapatkan secara sah, penggunaannya tetap harus sesuai dengan syariah; tidak diperbolehkan untuk tujuan haram, seperti mendukung kegiatan merusak atau tidak etis. Dengan demikian, ajaran Islam tidak hanya mengatur cara perolehan kekayaan, akan tetapi juga bagaimana kekayaan tersebut seharusnya digunakan.

Dalam hal ini menegaskan bahwasannya dalam Islam, aktivitas ekonomi harus selaras dengan akuntabilitas moral dan orientasi sosial yang tinggi. Seorang Muslim tidak memiliki kebebasan penuh dalam membelanjakan kekayaannya, karena semua akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah atas cara ia mendapatkan dan menggunakan hartanya. Oleh karenanya, sistem ekonomi Islam tidak hanya mencerminkan mekanisme keuangan,

tetapi juga merupakan kerangka nilai yang bersifat spiritual, etis, dan terintegrasi dalam kehidupan sehari-hari seorang Muslim. Untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai konsep kepemilikan dalam fiqih muamalah, seseorang harus melihat secara menyeluruh berbagai aspek aqidah, hukum, dan etika dalam Islam. Kekayaan dianggap sebagai titipan dari Allah, yang wajib dikelola dengan adil, dibagikan dengan seimbang, dan dimanfaatkan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

3) Penerapan Kaidah Al-Umuru Bi Maqasidiha dalam Penentuan Hak Kepemilikan

Dalam pandangan hukum Islam, kepemilikan dilihat tidak hanya dari aspek hukum formal, tetapi juga dari niat dan tujuan individu dalam memperoleh serta memanfaatkan harta. Prinsip al-umuru bi maqasidiha berfungsi sebagai pedoman utama dalam menilai keabsahan suatu perilaku, termasuk dalam konteks transaksi. Saat seseorang mengambil langkah hukum, motivasi yang mendasarinya akan mempengaruhi nilai hukum dari tindakan itu. Demikian pula dengan kepemilikan, prosedur hukum yang valid tidak hanya itu saja, tetapi juga harus diteliti apakah tujuannya sesuai dengan prinsip maqasid al-syariah. Penerapan prinsip ini dalam kepemilikan sangat krusial saat ini sebab banyak kasus kepemilikan yang secara resmi terlihat legal, tetapi memiliki maksud yang bertentangan dengan prinsip keadilan atau kepentingan bersama. Sebagai contoh, seseorang dapat membeli properti dalam angka yang banyak untuk menyimpan aset demi meningkatkan harga pasar. Dari perspektif kontrak, pembelian tersebut tidak menghadapi masalah. Akan tetapi, jika tujuannya adalah untuk menciptakan monopoli dan merugikan masyarakat, berdasarkan prinsip al-umuru bi maqasidiha, tindakan itu dapat dipandang tidak pantas dari segi moral syar'i. Kepemilikan yang diperoleh dengan niat semacam itu dapat dipertanyakan kevalidannya dalam konteks maqasid.

Dalam kegiatan sehari-hari, fenomena ini kerap muncul di sektor pertanahan. Investor membeli tanah subur kemudian membiarkannya tidak terpakai, dengan niat untuk menjualnya kembali dengan harga yang lebih tinggi. Tujuan seperti ini dapat membahayakan masyarakat yang membutuhkan lahan untuk bertani atau hunian. Oleh sebab itu, prinsip ini mengharuskan agar setiap bentuk kepemilikan memiliki tujuan yang menguntungkan dan tidak menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat. Tanah, sebagai aset penting, seharusnya tidak dimiliki hanya untuk kepentingan pribadi yang bersifat spekulatif. Contoh lain adalah transaksi e-commerce yang tampak legit, tetapi dilakukan dengan niat menipu. Misalnya,

seorang pedagang mempromosikan barang dengan keterangan yang salah, atau menggunakan ulasan palsu untuk menarik perhatian konsumen. Walaupun pembeli setuju dengan transaksi tersebut, jika niat penjual sejak awal adalah untuk menipu atau menyembunyikan kekurangan barang, maka transaksi itu bertentangan dengan prinsip syariah. Kepemilikan uang yang diperoleh penjual dapat dianggap tidak sah jika prosesnya melibatkan penipuan yang tersembunyi dalam niat.

Penerapan prinsip ini pun krusial dalam konteks sumbangan atau peninggalan. Kadang-kadang seseorang membagikan kekayaannya hanya kepada anak tertentu dengan tujuan mengecualikan yang lain. Apabila niat ini berlandaskan pada ketidakadilan atau keinginan untuk menghukum suatu pihak, maka pemberian tersebut menjadi persoalan dari segi moral. Prinsip al-umuru bi maqasidiha memberikan panduan untuk menilai bahwa kepemilikan yang diperoleh melalui cara yang tidak adil, walaupun sah menurut hukum positif, tetap tidak dapat diterima menurut syariat jika niat di baliknya salah. Prinsip ini juga berfungsi sebagai acuan dalam mengevaluasi transparansi kepemilikan. Di era sekarang, investasi dan aset digital adalah bagian dari transaksi modern. Apabila seseorang menggunakan celah hukum untuk menguasai dana publik melalui investasi ilegal, walaupun secara teknis tidak melanggar aturan, niatnya sudah bermasalah. Hal ini mengindikasikan bahwa hukum Islam tidak hanya mengevaluasi perilaku dari aspek luar, tetapi juga memperhatikan niat serta efek sosial yang timbul.

Oleh karena itu, prinsip ini menjadi sangat krusial dalam menilai moralitas di balik kepemilikan. Apakah kekayaan yang ada dimanfaatkan untuk hal positif, atau malah digunakan untuk menindas, menipu, atau mengeksploitasi orang lain? Penilaian ini sangat penting dalam menciptakan sistem ekonomi Islam yang tidak hanya memenuhi syarat hukum, tetapi juga adil dan berfokus pada kesejahteraan. Hak kepemilikan bukan hanya sebuah status hukum, tetapi juga merupakan tanggung jawab yang harus dilindungi dalam tujuan dan cara pemanfaatannya. Menurut penulis, sangat penting untuk meningkatkan pemahaman masyarakat bahwa kepemilikan dalam Islam tidak berarti kebebasan yang tanpa batas. Setiap tindakan hukum memiliki unsur batin yang juga mempengaruhi nilai hukumnya. Penguatan prinsip al-umuru bi maqasidiha dalam praktik muamalah saat ini penting agar umat Islam tidak terperangkap dalam legalitas tanpa makna serta melupakan nilai-nilai spiritual dan sosial. Dengan menjadikan niat sebagai landasan dalam menilai

validitas kepemilikan, ekonomi Islam dapat beralih ke sistem yang lebih adil, etis, dan memprioritaskan kesejahteraan umat.

4) Penerapan Kaidah Al-Umuru Bi Maqasidiha dalam Penentuan Hak Kepemilikan di Muamalah Kontemporer menurut Imam Al-Ghazali

Imam Al-Ghazali, sebagai salah satu pemikir utama dalam Islam, sangat menekankan tujuan dalam setiap tindakan termasuk dalam hal penguasaan kekayaan. Ia menyatakan bahwa prinsip Al-Umuru Bi Maqasidiha yang berarti setiap tindakan bergantung pada niatnya seharusnya dijadikan landasan utama dalam menilai keabsahan kepemilikan. Al-Ghazali berpendapat bahwa kepemilikan seharusnya tidak hanya dianalisis dari aspek hukum formal, tetapi juga harus dipertimbangkan dari perspektif maqasid syariah, yang merupakan tujuan utama dalam hukum Islam, mencakup perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, serta harta (hifzh al-mal).

Dalam pandangannya, Al-Ghazali menekankan bahwa kepemilikan yang benar adalah kepemilikan yang memberikan keuntungan bagi kepentingan publik. Harta yang hanya dikuasai dan dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi tanpa memberikan manfaat bagi masyarakat, bahkan menyebabkan kerugian, dianggap bertentangan dengan prinsip maqasid syariah. Dengan demikian, penerapan prinsip Al-Umuru Bi Maqasidiha menjadi krusial agar pemanfaatan harta berlandaskan niat baik dan keadilan sosial. Pengumpulan kekayaan tanpa pembagian manfaat dianggap sebagai bentuk kepemilikan yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam.

Selanjutnya, Al-Ghazali berpendapat bahwa kepemilikan yang benar harus mencerminkan keseimbangan antara hak individu dan tanggung jawab sosial. Harta, menurut sudut pandangnya, tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri, tetapi juga memiliki aspek moral dan spiritual. Oleh karena itu, setiap tipe kepemilikan perlu diarahkan untuk memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks muamalah saat ini, di mana variasi jenis kepemilikan semakin beragam, termasuk aset digital dan hak kekayaan intelektual, penerapan prinsip ini menjadi semakin penting. Al-Ghazali menekankan perlunya penerapan prinsip ini secara konsisten agar nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan tetap terjaga dalam berbagai aspek pengelolaan harta.

5) Penerapan Kaidah Al-Umuru Bi Maqasidiha dalam Penentuan Hak Kepemilikan di Muamalah Kontemporer menurut Yusuf Al-Qaradawi

Yusuf al-Qaradawi, seorang intelektual Islam kontemporer yang berpengaruh, sangat memperhatikan signifikansi prinsip Al-Umuru Bi Maqasidiha dalam pelaksanaan muamalah di zaman sekarang. Ia berkeyakinan bahwa penting untuk mengevaluasi semua tindakan berdasarkan tujuan dan niatnya, terutama ketika menghadapi situasi ekonomi global yang semakin kompleks akibat globalisasi dan kemajuan teknologi. Dia berpendapat bahwa perubahan dalam jenis kepemilikan dan metode transaksi ekonomi memerlukan pendekatan hukum Islam yang tidak hanya menekankan aspek legal formal, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai sosial dan moral. Oleh karena itu, al-Qaradawi menegaskan bahwa untuk menilai legalitas suatu kepemilikan atau transaksi ekonomi, perlu merujuk pada prinsip maqasid syariah, yang merupakan tujuan utama dari ajaran Islam.

Dalam konteks muamalah saat ini, al-Qaradawi menekankan signifikansi menerapkan prinsip Al-Umuru Bi Maqasidiha sehingga setiap transaksi kepemilikan—seperti jual beli, sewa, dan investasi dilaksanakan dengan maksud yang sesuai dengan nilai-nilai syariah. Ia memberikan ilustrasi transaksi jual beli saham yang secara hukum dapat dianggap sah, namun dari perspektif maqasid, keabsahannya tergantung pada niat dan efeknya. Apabila transaksi itu didorong oleh motivasi spekulatif yang berlebihan atau bertujuan merugikan pihak lain, maka meskipun sah secara hukum, transaksi tersebut tidak dapat diterima secara syar'i karena bertentangan dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan.

Selain itu, al-Qaradawi memperluas penerapan kaidah ini pada berbagai jenis kepemilikan modern, seperti hak cipta dan aset digital, yang belum banyak dibahas dalam kajian fiqh klasik. Ia menyatakan bahwa meskipun jenis kepemilikan ini modern, prinsip Al-Umuru Bi Maqasidiha tetap berlaku sebagai pedoman norma dalam mengevaluasi keabsahan dan keadilan. Ia menegaskan bahwa pemilikan hak cipta, paten, atau kekayaan digital harus dimanfaatkan untuk kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memberikan keuntungan bagi masyarakat. Sebaliknya, jika hak-hak ini dimanfaatkan untuk membentuk monopoli yang merugikan publik secara umum, maka itu bertentangan dengan maqasid syariah.

Dalam konteks ini, al-Qaradawi menganggap prinsip Al-Umuru Bi Maqasidiha sebagai pedoman normatif yang krusial bagi para ahli hukum, pelaku usaha, dan masyarakat

umumnya guna mengatasi kerumitan transaksi ekonomi masa kini. Penggunaan prinsip ini tidak hanya menjamin kekuatan hukum pada transaksi, tetapi juga memastikan semua aktivitas ekonomi tetap sejalan dengan etika Islam, mengedepankan prinsip keadilan, tanggung jawab sosial, dan kemaslahatan umat. Oleh sebab itu, al-Qaradawi berargumen bahwa penerapan prinsip ini dalam menetapkan kepemilikan berperan sebagai mekanisme krusial untuk memastikan aktivitas muamalah tetap berlandaskan nilai-nilai moral Islam di tengah tantangan zaman kini.

4. KESIMPULAN

Studi ini menekankan signifikansi kaidah al-umuru bi maqasidiha dalam menilai validitas dan etika kepemilikan dalam praktik muamalah kontemporer. Aturan ini menekankan bahwa setiap perilaku manusia perlu diukur berdasarkan niat dan tujuan yang mendasarinya. Dalam aspek kepemilikan, ini menunjukkan bahwa status hukum suatu aset tidak hanya ditentukan oleh prosedur legal yang resmi, tetapi juga harus mempertimbangkan tujuan dan dampaknya bagi kesejahteraan masyarakat. Prinsip ini menekankan aspek etis dan spiritual yang menjadi ciri khas hukum Islam. Kepemilikan menurut Islam tidak bersifat mutlak seperti dalam sistem kapitalis, melainkan diatur oleh tanggung jawab sosial dan moral. Oleh karena itu, kepemilikan dapat dianggap legal menurut syariat jika diperoleh melalui cara yang halal dan digunakan untuk tujuan yang tepat. Kaidah al-umuru bi maqasidiha merupakan penanda penting untuk membedakan tindakan yang terlihat sah tetapi memiliki niat yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Sebagai contoh, investasi dalam properti untuk spekulasi atau transaksi digital yang dilakukan dengan maksud penipuan mungkin tidak ada masalah secara resmi, namun dari sudut pandang syar'i akan dipertanyakan jika bertujuan merugikan pihak lain.

Imam Al-Ghazali berkeyakinan bahwa pemilikan harus ditujukan untuk tujuan umum. Ia menyoroti signifikansi maqasid syariah dalam menilai perilaku ekonomi. Menurut Al-Ghazali, kekayaan adalah sebuah kepercayaan yang perlu dikelola dengan tanggung jawab tinggi dan niat yang positif. Pemanfaatan kekayaan yang tidak memberikan keuntungan sosial atau malah berakibat negatif, bertentangan dengan asas keadilan dalam hukum Islam. Sementara itu, Yusuf Al-Qaradawi menyumbangkan kontribusi yang besar dalam menerapkan prinsip ini dalam konteks ekonomi masa kini. Ia mengingatkan bahwa transformasi dalam bentuk kepemilikan dan sistem transaksi karena globalisasi dan

digitalisasi tidak boleh membuat umat Islam mengabaikan prinsip moral. Segala bentuk kepemilikan, seperti hak cipta, saham, dan aset digital, harus dinilai berdasarkan tujuan dan manfaatnya. Apabila suatu kepemilikan digunakan untuk membangun monopoli atau mengeksploitasi individu lain, maka itu bertentangan dengan Maqashid Syariah.

Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa penerapan al-umuru bi maqasidiha sangat penting untuk mengarahkan kegiatan ekonomi ke arah yang tidak hanya sah, tetapi juga beretika dan memberikan manfaat. Kaidah ini menegaskan bahwa hukum Islam tidak hanya membahas prosedur, tetapi juga substansi niat serta nilai-nilai spiritual yang ada di dalamnya. Maka dari itu, prinsip ini menjadi dasar krusial dalam merancang sistem ekonomi Islam yang adil, etis, dan fokus pada kesejahteraan masyarakatan maqasid syariah.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Bahrum Siregar. "Al-Umuru Bi Maqashidihah," t.t.
- Dadan Hamdani. "Konsep Kepemilikan Sumber Daya Alam Dalam Ekonomi Islam" 4 (2024).
- Duski Ibrahim. *AL-QAWA`ID AL-FIQHIYAH (KAIDAH-KAIDAH FIQH)*. Palembang: Noer Fikri, t.t.
- Khairil Anwar, Mohd Soberi Awang, dan Muallimin Mochammad Sahid. "MAQASID SYARIAH MENURUT IMAM AL-GHAZALI DAN APLIKASINYA DALAM PENYUSUNAN KOMPILASI HUKUM ISLAM DI INDONESIA" 9 (Desember 2021).
- M Riezky Pradana, Lc., MH. "Makna Kaidah Al-Umuru Bi Maqasidiha," 1 Juni 2024.
- Musoli. "MAQASHID SYARIAH: KAJIAN TEORITIS DAN APLIKATIF PADA ISU-ISU KONTEMPORER" 5 (Juni 2018): 64.
- Sulistiawati dan Ahmad Fuad. "KONSEP KEPEMILIKAN DALAM ISLAM Studi atas Pemikiran Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani" 5 (Oktober 2017).
- Yusuf Al-Qaradawi. *Norma Dan Etika Ekonomi Islam*. Gema Insani, 2022.